



Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Fuly Prio Benda

Fuly Prio Benda (Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk), Email:
(priobenda@gmail.com)

ABSTRAK

Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi besar dan kompleks, termasuk bagi Pemerintah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, dimana berbagai fungsi dan kegiatan Kecamatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja secara terpadu dan simultan, koordinasi merupakan salah satu fungsi administrasi, sehingga jika fungsi koordinasi tidak dilaksanakan secara baik dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis koordinasi Camat dalam proses pembangunan di Kantor Kecamatan Kintom, menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang koordinasi vertikal (antar tingkat hierarki) dan horizontal (antar unit setara). Manfaat penelitian ini Secara teoritik menambah khasanah pengetahuan Ilmu Administrasi Publik. Secara praktis, menjadi masukan evaluasi koordinasi Pemerintah Kecamatan Kintom. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif, informan purposive (7 orang), data primer-sekunder via observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis: Reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi secara keseluruhan belum optimal. Koordinasi horizontal (dengan UPTD) lemah, sementara vertikal (laporan, usulan, petunjuk ke staf dan pemerintah desa/kelurahan) berjalan baik.

Kata Kunci: Koordinasi Camat, Koordinasi Vertikal, dan Koordinasi Horizontal

ABSTRACT

Coordination is essential in a large and complex organization, including the Kintom District Government in Banggai Regency. Various sub-district functions and activities must be carried out by various work units in an integrated and simultaneous manner. Coordination is one of the administrative functions, and if it is not implemented properly, it will automatically impact other functions. This study aims to analyze the coordination of

sub-district heads in the development process at the Kintom District Office, using Hasibuan's (2006) theory on vertical (between hierarchical levels) and horizontal (between equivalent units) coordination. Theoretically, this research will add to the body of knowledge in Public Administration. Practically, it will provide input for evaluating the coordination of the Kintom District Government. This research is a qualitative descriptive study, with purposive informants (7 people), and primary and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. Analysis: Data reduction, presentation, and conclusions. The results indicate that overall coordination is suboptimal. Horizontal coordination (with the Technical Implementation Units) is weak, while vertical coordination (reports, proposals, and instructions to staff and village/sub-district governments) is well-functioning.

Keywords: *Sub district Coordination, Vertical Coordination, and Horizontal Coordination*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pertumbuhan dan perbaikan yang berkelanjutan menuju tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pembangunan karakter, pola pikir, serta pembangunan fisik dan infrastruktur. Agar pembangunan nasional mencapai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial secara merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan keterpaduan, keserasian, dan keselarasan gerak dari seluruh unsur aparatur pemerintah. Untuk mencapai keterpaduan ini, koordinasi menjadi fungsi administrasi yang sangat esensial dan harus dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan, dari Pusat hingga Kelurahan/Desa.

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat dilakukan secara menyeluruh hingga ke pelosok daerah, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan esensial adalah kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Camat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Telah menjadikan Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, melainkan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah atau alat pemerintah pusat, melainkan beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah kecamatan.

Sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan, Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Camat harus mengedepankan koordinasi sebagai administrator bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta sebagai pimpinan tim kerja perangkat wilayah kecamatan.

Koordinasi sangat diperlukan dalam organisasi yang besar dan kompleks seperti Pemerintah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, karena berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja secara terpadu dan simultan. Jika koordinasi tidak berjalan baik, fungsi-fungsi administrasi lainnya akan terpengaruh. Menurut Poelje (Syafudin, 1993), kerja sama antar aparatur dan pertaliannya adalah masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting. Kemudian Hasibuan (2006) membagi koordinasi menjadi dua tipe utama yaitu Koordinasi Vertikal, merupakan Koordinasi antara atasan dan bawahan (Camat dengan staf, atau Camat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan). Kemudian Koordinasi Horizontal merupakan Koordinasi antar-unit atau instansi yang sejajar yaitu Camat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD. Pelaksanaan koordinasi dimaksudkan agar secara keseluruhan program yang terdapat pada setiap aparatur pemerintah dapat berjalan sebagai mana mestinya. Sebagaimana menurut Suryadi (2008), bahwa tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, yang dipimpin oleh Camat Kintom, diukur dari kemampuan Camat untuk menyelaraskan tindakan dan menyerempakkan waktu dari berbagai unit terpisah di kecamatan, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai target. Camat harus mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan berbagai elemen pendukung.

Permasalahan dan Indikasi Kurangnya Koordinasi di Kecamatan Kintom menunjukkan adanya ketidakberhasilan Camat Kintom dalam mengimplementasikan tugas-tugas yang dibebankan, yang diindikasikan oleh metode koordinasi yang relatif statis dan tidak inovatif. Berkaitan dengan permasalahan koordinasi vertikal, terlihat dari Kurangnya koordinasi vertikal Camat Kintom ditunjukkan oleh beberapa indikasi. Serta Rendahnya Pelaksanaan Tugas Staf Kecamatan, terlihat dari Staf sering masuk dan keluar kantor tidak pada waktunya, melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*), dan saling melempar tanggung jawab saat melayani urusan masyarakat. Selain itu kurangnya orientasi dalam mengikuti pelatihan, dimana Camat lebih cenderung mengikutkan staf yang dianggap dekat, bukan yang sesuai dengan bidang

tugasnya. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat rendah dalam musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*) di tingkat desa maupun Kecamatan, yang mengindikasikan kurangnya potensi Camat/Kecamatan dalam melakukan koordinasi vertikal dengan kepala-kepala desa/lurah. Hal tersebut diduga karena Kepemimpinan Camat kurang tegas dalam mendorong koordinasi staf bawahan dan aparat desa dalam rapat koordinasi pembangunan, menyebabkan banyak pihak yang tidak hadir, yang pada akhirnya melemahkan koordinasi vertikal dan berdampak buruk pada koordinasi horizontal.

Disisi lain permasalahan koordinasi horizontal terjadi disebabkan Kurangnya koordinasi horizontal Camat Kintom dengan instansi-instansi terkait, diketahui melalui Camat dinilai kurang memiliki kemampuan pribadi dalam hal kharismatik dan kredibilitas sebagai *top leader* untuk melakukan koordinasi yang efektif dengan instansi lain yang sejajar di wilayah kecamatan. Begitu juga Pemerintah Kecamatan lebih cenderung menjalankan program tanpa terkoordinasi dengan baik bersama instansi teknis lainnya di Kecamatan Kintom. Serta belum terkoordinasinya potensi-potensi yang dimiliki Kecamatan Kintom dengan membimbing Pemerintah Desa dan Kelurahan mengembangkan potensi yang ada, padahal Camat seharusnya menjadi tokoh panutan dan aset daerah yang menunjukkan kepemimpinan dalam mempengaruhi berbagai elemen untuk melaksanakan pembangunan.

Kurang tegasnya kepemimpinan Camat Kintom Kabupaten Banggai dalam mendorong koordinasi staf bawahannya dan aparat desa dalam lingkup wilayah kerjanya pada saat dilaksanakannya rapat koordinasi seperti pada pertemuan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai berimbas pada kurang terkoordinasinya pertemuan-peretemuan antara pihak kecamatan dan pemerintah desa dan instansi terkait karena banyak yang tidak dapat hadir pada rapat koordinasi tersebut, hal ini memberikan gambaran lemahnya koordinasi vertikal yang berdampak pada koordinasi Horizontal.

Bertitik tolak dari uraian permasalahan yang ada, maka menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Koordinasi Camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.?. Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Koordinasi Camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai diharapkan dalam penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritik dapat dijadikan bahan acuan penelitian lebih lanjut yang berguna dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik sekaligus dapat menambah khasanah kepustakaan. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak Pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai khususnya Pemerintah Kecamatan Kintom mengenai koordinasi Camat sehingga diharapkan menjadi evaluasi kedepan.

Berkaitan dengan penelitian ini, akan digunakan tipe koordinasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hasibuan (2006), bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Teori koordinasi yang dikemukakan tersebut akan digunakan untuk menakar koordinasi yang dilakukan oleh Camat Kintom dalam proses pembangunan, dalam hal ini koordinasi yang dilakukan camat secara vertikal kepada aparatur pemerintahan yang berada di internal kecamatan dan juga kepala-kepala desa diwilayah Kecamatan Kintom, begitu juga koordinasi yang dilakukan camat secara horinzontal kepada instansi-instansi sejajar dengan kecamatan yang berada dalam wialayah Kecamatan Kintom. Penggunaan pendapat Hasibuan tersebut diharapkan dapat menganalisis lebih ilmiah permasalahan koordinasi camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Kintom.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2008) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Bogdan dan Taylor (Basrowi dan Suwandi, 2008), bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Lebih Lanjut Hadjar dalam Basrowi dan Suwandi (2008) penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifanya secara umum terhadap kenyataan sosial dari persektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum untuk yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Dengan demikian penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peranan Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai yang memfokuskan pada peranan Camat dalam mengkoordinasi pelaksanaan

pembangunan di Kecamatan tersebut. Penetapan lokasi penelitian dilakukan karena masih masih terdapat kurangnya Koordinasi vertikal yang dilakukan Camat Kintom Kabupaten Banggai baik terhadap Staf-staf bawahnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maupun kepada pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Kintom. Selain itu masih terdapat kurangnya koordinasi yang dilakukan camat secara horinzontal dengan instansi-instansi teknis yang berada di wilayah Kecamatan Kintom.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, menurut Sugiyono (2009), teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya informan ditentukan atau dipilih secara sengaja karena dianggap mengetahui objek dan masalah dalam penelitian ini. Penentuan informan penelitian berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini informan penelitian yang ditetapkan peneliti berjumlah 7 orang yaitu : Sekcam Kintom, Kepala Seksi di Kantor Camat Kintom sebanyak 2 orang, Kepala Desa di Kecamatan Kintom sebanyak 2 orang, dan Instansi Seajar Pemerintah Kecamatan yang berada di Kecamatan Kintom sebanyak 2 Orang yang di ambil dari masing instasi yang berbeda.

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi di lokasi penelitian. 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, karya ilmiah yang relevan serta referensi-referensi lainnya yang dapat memberikan masukan dan informasi bagi peneliti. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2007), yaitu terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Masing-masing adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jabatan camat adalah jabatan karier yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan.

Secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati, akan tetapi pertanggung jawabannya dilakukan secara administratif melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. Dalam kerangka otonomi daerah, tugas dan fungsi Camat ditempatkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian dipercayakan untuk mengatur masyarakatnya.

Salah satu usaha yang masuk dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh Camat adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Sebab Camat memiliki peranan yang penting sebagai administrator di bidang pembangunan, antara lain pengarahan usaha dan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan guna membantu kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan di kecamatan, sehingga membutuhkan suatu koordinasi.

Hasibuan (2006), berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya Hasibuan (2006) berpendapat bahwa koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi Camat di wilayah Kecamatan Kintom merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selain itu koordinasi Camat merupakan sistem, sehingga sistem tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi dan kesepahaman antara Camat dengan para bawahannya, oleh karena itu penerapan koordinasi harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin.

Salah satu aspek penting dari koordinasi Camat adalah bagaimana peranan Camat Kintom dalam membuat dan mengorganisasikan segala keputusan-keputusan bersama, maka segala keputusan-keputusan yang dibuat haruslah melalui koordinasi, hal ini dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Kintom sehingga dapat terealisasi dengan baik.

Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur (Hasibuan, 2006).

Koordinasi vertikal merupakan pola koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat Kintom kepada para staf bawahannya atau sebaliknya. Koordinasi dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan sedangkan dari atasan dalam hal ini Camat berupa pemberian petunjuk. Koordinasi vertikal antar Camat

Kintom yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis dalam hal ini Staf pemerintah Kecamatan Kintom serta Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Kintom.

Pelaksanaan sistem koordinasi vertikal dilakukan Camat dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin atau berkala, adapun sistem koordinasi vertikal yang sudah dilaksanakan secara rutin atau berkala tersebut, ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin yang dipimpin langsung oleh Camat dengan staf bawahannya disini staf bawahannya adalah Sekretaris Kecamatan, kepala-kepala seksi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, dimana dalam pertemuan rutin tersebut bertujuan dalam rangka membahas berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kintom yang akan dilaksanakan. Pertemuan rutin tersebut merupakan keterlibatan Camat dalam koordinasi vertikal dengan staf bawahannya ini menunjukkan Camat Kintom melaksanakan koordinasi dengan menghadiri dan memimpin secara langsung rapat-rapat koordinasi dengan staf bawahannya.

Rapat dengan bawahannya merupakan prioritas Camat Kintom dalam pelaksanaan koordinasi, selain keberadaan Camat sebagai pimpinan juga mempunyai fungsi memberikan petunjuk kepada bawahan karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Camat selaku kepala wilayah kecamatan. Secara otomatis jika menghendaki pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil dengan baik harus melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya termasuk staf bawahannya.

Camat Kintom selaku koordinator pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan, berupaya memberikan petunjuk tentang aturan-aturan pelaksanaan pembangunan terhadap bawahannya, sebagai dasar pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan sesungguhnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan kerja sama diantara unsur terkait yaitu Camat sebagai pimpinan dan staf bawahannya dan pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikecamatan, sehingga sistem koordinasi vertikal yang di terapkan pada Pemerintah Kecamatan Kintom juga merupakan bagian dari petunjuk langsung oleh Camat terhadap bawahannya.

Oleh karena itu arahan-arahan yang berupa petunjuk langsung yang diberikan Camat Kintom kepada bawahannya di Pemerintah Kecamatan Kintom dapat diketahui manfaatnya. Manfaat petunjuk langsung merupakan penyamaan persepsi agar dalam melaksanakan tugasnya pegawai Kecamatan memahami apa yang di kerjakannya sekaligus menciptakan kerja sama baik antara Camat dengan bawahannya atau antara

seksi dengan seksi lainnya begitu juga dengan pemerintah desa dan kelurahan yang ada di wilayah kerjanya, karena bagian satu akan mendukung bagian yang lain.

Petunjuk langsung Camat Kintom terhadap bawahannya merupakan bagian dari kesatuan langkah untuk meningkatkan kerja sama diantara pegawai Kecamatan, sehingga berdampak pada pemahaman pegawai kecamatan terhadap berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsinya. Melalui arahan-arahan dan berupa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat kepada staf bawahannya kemudian dilanjutkan penjabaran setiap masing-masing seksi serta kepala-kepala desa, selalu melalui komunikasi timbal balik, baik antara Camat dan staf bawahannya.

Pada dasarnya koordinasi vertical juga sebagai media untuk pemberian laporan-laporan, dari aparat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Kintom kepada Camat. Koordinasi melalui pemberian laporan-laporan yang akan dilakukan bawahannya, dimaksudkan untuk memberi gambaran akan kemungkinan langkah-langkah dan hambatan-hambatan sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengambil berbagai kebijakan-kebijakan. Dalam koordinasi vertikal tersebut, selain membahas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kintom juga pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan, karena pertemuan rapat koordinasi tersebut sebagai wadah untuk memberi laporan tentang hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bagian termasuk laporan dari pemerintahan desa.

Sejalan dengan itu menurut Sutarto (1993), manfaat dari koordinasi ialah sebagai berikut :

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
- c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat.
- d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.
- e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
- f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
- g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

- h. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
- i. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan antara sesama pejabat lainnya.
- j. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
- k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.
- l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.
- m. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.

Penegasan disampaikan oleh Ndraha (2003), bahwa koordinasi sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Sebagaimana fenomena yang ada menggambarkan Camat Kintom berupaya melakukan koordinasi dengan aparat bawahannya, untuk dapat mendapatkan usulan dan saran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kintom. Sekaligus menyangkut kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disertai dengan pemikiran-pemikiran pemecahan masalah yang dihadapi, dengan demikian akan terbangun rasa tanggung jawab, serta motivasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Usulan dan saran dari bawahan diharapkan menjadi masukan bagi Camat sehingga menjadi alternatif-alternatif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kintom kearah yang lebih baik.

Selain itu, Koordinasi vertikal dengan melibatkan masyarakat dalam wadah tertentu seperti, Tim penggerak PKK, Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam lingkup wilayah Kecamatan Kintom menjadikan koordinasi vertikal sebagai media usulan dan saran kepada pemerintah Kecamatan Kintom dalam hal ini Camat dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam proses pembangunan di Kecamatan Kintom maka Camat, perlu melakukan koordinasi secara vertikal dan koordinasi tersebut sudah berjalan dengan baik. hal ini ditujukan untuk dapat mengsinerjikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kintom maka peranan Camat sangatlah signifikan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi perlu untuk melakukan

koordinasi antara camat dan stafnya serta camat dan pemerintah desa serta kelurahan di wilayah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordinatiori*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat (Hasibuan, 2006).

Koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilaksanakan antara Aparatus kecamatan yang mempunyai kedudukan sama. Koordinasi horizontal ini merupakan koordinasi yang bertujuan untuk menukar informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kintom. Koordinasi horizontal, merupakan koordinasi antara Camat Kintom yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat kedudukan setingkat pemerintah kecamatan dalam hal ini instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Kintom.

Sistem koordinasi horizontal sebenarnya mempunyai sasaran yang berbeda dengan pola koordinasi vertikal. Sistem koordinasi horizontal mempunyai sasaran untuk memberikan informasi atau mengkonfirmasi terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kintom tersebut, dengan sendirinya sistem dan metode koordinasi horizontal tidak jauh berbeda dengan koordinasi vertikal, hanya yang membedakan ialah kedudukan dari Aparatus kecamatan yang sama tersebut seperti antara seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, dengan seksi Kesejahteraan masyarakat begitupula dengan seksi-seksi lainnya di Kantor Kecamatan Kintom. Dengan demikian maka koordinasi horizontal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Salah satu indikator keberhasilan dari koordinasi adalah terciptanya kerja sama antara Camat dan UPTD di wilayah Kecamatan Kintom yaitu membangun kerja sama antara melalui suatu proses pembinaan mulai hubungan-hubungan personil mulai tingkat pimpinan sampai ketingkat yang terbawah. Tata hubungan antara Camat dengan UPTD harus dibina dengan melalui hubungan kerja dan hubungan antar instansi. Hubungan hubungan kerja antara Camat dan UPTD dapat dikategorikan sebagai hubungan formal dalam satuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya.

Koordinasi horizontal merupakan upaya untuk mengsinkronisasikan dan menselaraskan semua tindakan dan kegiatan yang akan dijalankan oleh aparatur Kecamatan Kintom, selain itu koordinasi horizontal juga suatu usaha menyerempakkan tindakan-tindakan yang ada dalam Pemerintah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan maka kegiatan koordinasi antara seksi-seksi di Kantor Kecamatan Kintom diperlukan dengan berbagai karena sasaran dari koordinasi ialah menyelaraskan dan menyerasikan semua pekerjaan atau kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan. Sehingga peran Camat begitu signifikan untuk menciptakan koordinasi antara seksi di Kantor Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Selain itu koordinasi horizontal yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan juga merupakan suatu usaha untuk menyelaraskan tindakan dan menyerempakkan waktu yang telah dilakukan oleh berbagai kesatuan unit terpisah supaya tugas-tugas tercipta secara harmonis. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini belum terlaksana dengan baik karena belum adanya pertemuan rutin antara UPTD dan Pemerintah Kecamatan Kintom. Untuk menindak lanjuti koordinasi horizontal, maka usaha yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung antara seksi-seksi di Kantor Kecamatan Kintom. Diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik dilakukan koordinasi secara langsung untuk membahas mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut. Sedangkan upaya lain ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin antara seksi-seksi untuk melakukan rapat koordinasi bulanan. Koordinasi sebagai tugas umum pimpinan dalam hal ini Camat, maka pelaksanaan koordinasi horizontal akan melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya, dan juga selalu berhubungan satu sama lainnya termasuk dengan UPTD kecamatan dari instansi lain di luar kecamatan.

Koordinasi antara Camat Kintom dengan UPTD sebagai media komunikasi antara Camat dengan UPTD di wilayah Kecamatan Kintom guna menyampaikan informasi

antara lain, program kerja yang akan dilaksanakan, perubahan tata cara, perubahan aturan, cara bekerja, dan informasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan adanya penyampaian informasi seperti diatas akan timbul persepsi yang sama atau kesepahaman diantara Camat dan UPTD di wilayah Kecamatan Kintom apabila terjadi persepsi yang sama terhadap tugas dan pekerjaan akan menimbulkan atau melahirkan kesatuan tindakan sehingga hal tersebut mempengaruhi koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat.

Hubungan-hubungan tersebut diawali dengan komunikasi antara Camat Kintom beserta Forkopincam dan UPTD yang ada di Kecamatan Kintom seperti Balai Penyulu Pertanian, Balai BKKBN Kecamatan Kintom, UPTD Puskesmas Kintom dan Koordinator Pendidikan (Kordik) Kecamatan Kintom kesalahan-kesalahan komunikasi diantara Camat dan UPTD dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan bagi kedua pihak sehingga secara otomatis tidak dapat menciptakan kerja sama. Selanjutnya kerja sama bisa terbina dan terbangun atas dasar adanya kesepakatan dan komitmen, adanya sanksi bagi yang mengingkari, adanya penentuan waktu, adanya informasi dan didukung oleh kesadaran semua Aparat Kecamatan dan UPTD di wilayah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Sebagaimana dikemukakan Hasibuan (2006), bahwa salah faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah Komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Kemudian dijelaskan oleh G. R. Terry (Handyaningrat, 2005), Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi sinkronisasi kerjasama antara Camat atau pemerintah kecamatan dengan UPTD akan terjalin dengan baik, jika dibangun dengan komitmen yang tinggi dan harus dipegang kedua belah pihak sehingga sudah seharusnya pertemuan dengan UPTD dimasa akan datang haruslah lebih rutin. Kerjasama yang dibangun dengan kepercayaan, akan menunjukkan adanya kesepahaman, adanya mekanisme tentang pelaksanaan kewenangan antara pemerintah kecamatan dengan UPTD.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi horizontal juga berdampak pada adanya kerjasama antara Camat Kintom dan UPTD sehingga kerjasama tersebut melahirkan kesepahaman tentang arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Hasil pembahasan menunjukan bahwa koordinasi horizontal antara pemerintah kecamatan UPTD, di wilayah kecamatan Kintom Kabupaten Banggai belum rutin dilaksanakan.

KESIMPULAN

Sebagaimana hasil pembahasan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Koordinasi Camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai belum secara keseluruhan terlaksana dengan baik, dikarenakan dari 2 (dua) tipe koordinasi menurut Hasibuan yang dijadikan tolak ukur, masih ada satu koordinasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu koordinasi Horizontal antara camat dan UPTD yang ada di wilayah Kecamatan Kintom yang masih memiliki kelemahan signifikan, terutama pada aspek rutinitas pertemuan dan pengintegrasian program lintas sektor. Sedangkan koordinasi yang sudah terlaksana dengan baik adalah Koordinasi Vertikal baik itu pemberian laporan, pemberian usulan, pemberian petunjuk yang dilakukan antara camat dan staf di Kantor dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis menyampaikan beberapa saran Guna meningkatkan koordinasi Camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Khususnya berkaitan dengan Koordinasi Horizontal, yaitu :

- 1) Camat perlu menginisiasi dan menjadwalkan pertemuan rutin (misalnya bulanan atau triwulanan) dengan kepala/perwakilan seluruh UPTD yang ada di wilayah Kecamatan Kintom. Tujuannya adalah untuk membahas isu-isu pembangunan, menyelaraskan program kerja, dan mengidentifikasi hambatan lintas sektoral.
- 2) Camat hendaknya menciptakan kerjasama serta sinkronisasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kecamatan bersama UPTD di wilayah Kecamatan Kintom, agar dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kintom terjadi sinergitas. Dengan demikian arah dari pembangunan di kecamatan Kintom dapat mencakup masyarakat secara keseluruhan melalui UPTD yang secara teknis bersentuhan langsung dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta
- Handyanigrat (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung : Jakarta.
- Hasibuan, S.P.M. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (terjemahan) Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS) : Jakarta.
- Ndraha, Tadzidulu (2003). *Kybernology*. Rineka Cipta : Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Sotarto (1993). *Dasar-Dasar Organisasi*, cet 16. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Sugiyono (2008). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA : Bandung.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan Metode R & D) Cetakan Ke Tujuh Belas*. ALFABETA : Bandung.

Suryadi (2008), Suryadi, Prawiro Sentono, 2008. *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Syafrudin, Ateng. (1993). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.